

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan WNI yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dilakukan dalam bentuk imbauan serta evakuasi. Proses perlindungan WNI memang sudah dilakukan berdasarkan rencana kontijensi yang telah disesuaikan secara berkala dengan kondisi yang terjadi di lapangan, namun masih terdapat beberapa hal yang masih bisa diperbaiki. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap WNI di Ukraina pun memiliki sejumlah perbedaan dengan perlindungan yang diberikan kepada WNI di wilayah konflik lainnya karena adanya perbedaan pada kondisi yang terjadi di lapangan sehingga menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil langkah yang berbeda pula.

Beberapa hal yang bisa disebutkan sebagai aspek yang mengurangi kinerja pemerintah Indonesia dalam pemberian perlindungan terhadap WNI adalah keterlambatan pihak KBRI dalam memberikan informasi terkini bagi WNI yang berada di Ukraina, sehingga terdapat sejumlah WNI yang berinisiatif untuk bergerak lebih awal dalam mengevakuasikan diri. Kemudian dalam proses evakuasi sendiri, KBRI menunjukkan sejumlah ketidaksiapan yang turut menurunkan kinerja mereka dalam memberikan upaya perlindungan yang maksimal bagi WNI. Hal yang dapat digarisbawahi pada saat proses evakuasi adalah bagaimana keperluan

logistik WNI tidak dapat dipenuhi dengan baik, kurangnya perhatian terhadap kondisi psikis WNI yang dievakuasi, serta proses yang lambat dan kurang terorganisasi.

4.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data-data yang digunakan dalam mendukung penelitian ini sebagian besar merupakan data yang bersifat primer. Namun dalam realisasinya, terdapat keterbatasan dalam mengakses data-data primer tersebut. Dalam mengembangkan penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengumpulkan data yang lebih banyak lagi dan mampu menjalin komunikasi dengan seluruh pihak terkait agar hasil dari penelitian yang dilakukan lebih komprehensif.

Selain saran terhadap peneliti selanjutnya, penulis juga memiliki sejumlah saran yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia dalam memperbaiki kinerjanya dalam melakukan perlindungan terhadap WNI di kemudian hari. Dalam melakukan perlindungan terhadap WNI di luar negeri, terutama pada kondisi darurat, diharapkan pemerintah Indonesia dapat memperbaiki birokrasinya agar dapat menyesuaikan dengan kondisi yang genting dan membutuhkan respon yang cepat. Selain itu, diharapkan perwakilan RI yang berada di luar negeri dapat mempersiapkan diri, baik secara strategi maupun materil, agar dapat dengan sigap berhadapan dengan situasi serupa dan tidak menunggu kondisi memburuk terlebih dahulu untuk bertindak.